

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018**

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018**



JL. KAYUAMBON NO. 80 LEMBANG

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandung, 31 Desember 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Liferdi, SP, M.Si  
NIP. 19701007 199803 1 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.5.4. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.5. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.6. Ekuitas

### C.6.1. Ekuitas

- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
  - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
  - D.2. Beban Pegawai
  - D.3. Beban Persediaan
  - D.4. Beban Barang dan Jasa
  - D.5. Beban Pemeliharaan
  - D.6. Beban Perjalanan Dinas
  - D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
  - D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
  - D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
  - D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
  - E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
    - E.4.1. Koreksi Lain-lain
    - E.4.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
    - E.4.3. Penyesuaian Nilai Aset
    - E.4.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap
  - E.5. Transaksi Antar Entitas
    - E.5.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
    - E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
  - E.6. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, 31 Desember 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Liferdi, SP, M.Si  
NIP. 19701007 199803 1 001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp449,490,436.00 atau mencapai 112.37% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp400,000,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp60,197,969,775.00 atau mencapai 69.95% dari alokasi anggaran sebesar Rp86,053,939,000.00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp74,117,345,844.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1,669,397,000.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp72,425,690,770.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp22,258,074.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp74,117,345,844.00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp364,717,700.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp64,955,668,304.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-64,590,950,604.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp6,328,278,952.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-58,262,671,652.00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp20,380,298,884.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-58,262,671,652.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp51,301,456,241.00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp60,698,262,371.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp74,117,345,844.00.

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	400,000,000.00	449,490,436.00	112.37	1,011,055,574.00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>400,000,000.00</b>	<b>449,490,436.00</b>	<b>112.37</b>	<b>1,011,055,574.00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	8,461,217,000.00	7,969,922,769.00	94.19	8,875,760,549.00
Belanja Barang	B.4.	75,058,302,000.00	49,766,731,221.00	66.30	17,106,196,314.00
Belanja Modal	B.5.	2,534,420,000.00	2,461,315,785.00	97.12	4,059,792,164.00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>86,053,939,000.00</b>	<b>60,197,969,775.00</b>	<b>69.95</b>	<b>30,041,749,027.00</b>



## II. NERACA

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	60,000,000.00	118,300,000.00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.2.	0.00	16,387,684.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	-6,000,000.00	-591,500.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.4.	0.00	-9,203,784.00
Persediaan	C.1.5.	1,615,397,000.00	532,303,000.00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1,669,397,000.00</b>	<b>657,195,400.00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.2.1.	47,379,008,000.00	5,715,200,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	17,152,195,221.00	14,545,861,236.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	18,412,816,709.00	10,169,798,514.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2,436,146,060.00	2,577,718,226.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	403,126,882.00	387,541,882.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6.	-12,376,966,323.00	-11,053,694,273.00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6.	-415,522,427.00	-1,947,132,595.00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6.	-565,113,352.00	-660,959,790.00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>72,425,690,770.00</b>	<b>19,734,333,200.00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	6,115,000.00	6,115,000.00
Aset Lain-lain	C.4.2.	445,565,400.00	327,765,400.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.4.3.	-424,836,076.00	-327,765,400.00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-4,586,250.00	-3,057,500.00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>22,258,074.00</b>	<b>3,057,500.00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>74,117,345,844.00</b>	<b>20,394,586,100.00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	0.00	14,287,216.00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>0.00</b>	<b>14,287,216.00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>0.00</b>	<b>14,287,216.00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.6.	74,117,345,844.00	20,380,298,884.00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>74,117,345,844.00</b>	<b>20,380,298,884.00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>74,117,345,844.00</b>	<b>20,394,586,100.00</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	364,717,700.00	1,123,614,346.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>364,717,700.00</b>	<b>1,123,614,346.00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	7,969,922,769.00	8,875,760,549.00
Beban Persediaan	D.3.	8,117,466,355.00	8,683,725,015.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	8,230,155,506.00	5,847,866,679.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	685,948,000.00	737,340,150.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	4,529,562,655.00	2,570,507,851.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	33,658,657,389.00	13,762,325,723.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1,767,750,914.00	1,398,689,347.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	-3,795,284.00	9,795,284.00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>64,955,668,304.00</b>	<b>41,886,010,598.00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-64,590,950,604.00</b>	<b>-40,762,396,252.00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	6,347,696,802.00	591,374,152.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	19,417,850.00	2,457,601,407.00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>6,328,278,952.00</b>	<b>-1,866,227,255.00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-58,262,671,652.00</b>	<b>-42,628,623,507.00</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	20,380,298,884.00	33,970,356,438.00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	-58,262,671,652.00	-42,628,623,507.00
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	0.00	0.00
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4		
Koreksi Lain-lain	E.4.1.	0.00	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2.	-7,412,064.00	-1,528,750.00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.3.	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4.	51,308,868,305.00	0.00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5.	60,698,262,371.00	29,040,094,703.00
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>74,117,345,844.00</b>	<b>20,380,298,884.00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat didirikan pada tanggal 1 April 1994 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 798/Kpts/OT.210/12/94. Pada waktu itu BPTP Jawa Barat disebut dengan nama BPTP Lembang dengan wilayah tugas meliputi Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan perkembangannya Keputusan Menteri Pertanian RI No. 798/Kpts/OT.210/12/94 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu melalui Peraturan Menteri Pertanian RI No. 350/Kpts/OT.210/6/2001, namanya berubah menjadi BPTP Jawa Barat dan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 20/Permentan/OT.140/3/2013.

Sejak tahun 1994 telah banyak yang dilakukan BPTP Jawa Barat, dan diantaranya telah banyak pula yang dimanfaatkan oleh *stakeholders* maupun petani. Namun demikian masih banyak pula masalah sepenuhnya belum tertangani pada periode waktu tersebut dan oleh karenanya diperlukan upaya untuk mengantisipasi masalah tersebut dan masalah yang akan timbul pada lima tahun berikutnya.

BPTP Jawa Barat menyadari bahwa dinamika pembangunan pertanian yang begitu pesat diiringi dengan berbagai permasalahan seperti perubahan iklim yang dinamis, konversi sumber daya lahan pertanian ke non pertanian, pelarian tenaga kerja pertanian kepada lapangan pekerjaan lain, penguasaan lahan pertanian yang semakin sempit serta kurang responnya petani kepada inovasi yang diintroduksi menuntut BPTP Jawa Barat untuk lebih banyak lagi berupaya menghasilkan rakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dibutuhkan oleh petani.

Disamping itu, sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan ujung tombak Kementerian Pertanian di daerah, BPTP Jawa Barat harus lebih berperan dalam menyukseskan visi dan misi Kementerian Pertanian di daerah, tidak hanya melalui rakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dihasilkan namun juga melalui peran kelembagaan yaitu sebagai intermediasor kelembagaan lain dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Peran sebagai intermediasor kelembagaan diperlukan mengingat adanya peran kelembagaan lain dalam mendukung keberhasilan misi Kedaulatan Pangan. Kelembagaan lain tersebut sudah barang tentu memerlukan rujukan arah dan implementasi dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna. Kondisi inilah yang harus diisi oleh BPTP Jawa Barat untuk menjadikan kelembagaan tersebut menjadi lembaga yang memiliki akselerasi yang sama cepatnya dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Renstra BPTP Jawa Barat 2015-2019 disusun selain untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pengkajian BPTP juga menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, menetapkan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diversifikasi. Renstra BPTP Jawa Barat

2015-2019 sebagai kelanjutan dari Renstra BPTP Jawa Barat 2010-2014 Renstra ini diharapkan bisa menjadi skenario jangka menengah BPTP Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang meliputi manajemen organisasi, pembinaan SDM, peningkatan sarana dan prasarana, dan pendanaan.

### **Arah Kebijakan BPTP**

Sebagai UPT di bawah Balitbangtan dan Kementerian pertanian, maka arah kebijakan yang akan diambil BPTP yaitu kebijakan pembangunan pertanian dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045 (SIPP 2013-2045) dan sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat adalah sebagai berikut:

##### **(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### **(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(5) Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);



- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- c. Penyusutan Aset Tetap**
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
  - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
    - a. Tanah
    - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
    - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
  - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
  - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(6) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	232,000,000.00	232,000,000.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	168,000,000.00	168,000,000.00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9,840,216,000.00	8,332,710,000.00
Belanja Lembur	128,507,000.00	128,507,000.00
Belanja Barang Operasional	1,329,162,000.00	1,334,106,000.00
Belanja Barang Non Operasional	4,104,278,000.00	6,689,276,000.00
Belanja Barang Persediaan	5,803,586,000.00	4,011,760,000.00
Belanja Jasa	1,186,450,000.00	1,288,650,000.00
Belanja Pemeliharaan	418,590,000.00	413,590,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,607,450,000.00	4,736,625,000.00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0.00	56,584,295,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	380,393,000.00	2,418,745,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100,000,000.00	100,000,000.00
Belanja Modal Lainnya	15,675,000.00	15,675,000.00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>25,914,307,000.00</b>	<b>86,053,939,000.00</b>

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp449,490,436.00 atau mencapai 112.37% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp400,000,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0.00	16,387,700.00	0.00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	232,000,000.00	419,767,700.00	180.93
Pendapatan Jasa Lainnya	0.00	3,250,000.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	0.00	10,085,036.00	0.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	168,000,000.00	0.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>449,490,436.00</b>	<b>112.37</b>

Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami penurunan sebesar -55.54% dibandingkan TA 2017. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	16,387,700.00	0.00	0.00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	419,767,700.00	0.00	0.00
Pendapatan luran dan Denda	0.00	130,717,396.00	- 100.00
Pendapatan Jasa	0.00	12,675,000.00	- 100.00
Pendapatan Jasa Lainnya	3,250,000.00	0.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	10,085,036.00	5,741,228.00	75.66
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0.00	861,921,950.00	- 100.00
<b>Jumlah</b>	<b>449,490,436.00</b>	<b>1,011,055,574.00</b>	<b>-55.54</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp60,197,969,775.00 atau 69.95% dari anggaran belanja sebesar Rp86,053,939,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	8,461,217,000.00	7,977,595,522.00	94.28
Belanja Barang	75,058,302,000.00	49,766,731,221.00	66.30
Belanja Modal	2,534,420,000.00	2,461,315,785.00	97.12
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>86,053,939,000.00</b>	<b>60,205,642,528.00</b>	<b>69.96</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>-7,672,753.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>86,053,939,000.00</b>	<b>60,197,969,775.00</b>	<b>69.95</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 100.38% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Realisasi pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 100,38% pada Pos Belanja Barang
2. Adanya Penambahan Pagu sehingga dilakukan Revisi DIPA TA. 2018 untuk Kegiatan (Berantas Kemiskinan Rakyat Sejahtera) BEKERJA

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Belanja Pegawai	7,969,922,769.00	8,875,760,549.00	-10.21
Belanja Barang	49,766,731,221.00	17,106,196,314.00	190.93
Belanja Modal	2,461,315,785.00	4,059,792,164.00	-39.37
<b>Total Belanja</b>	<b>60,197,969,775.00</b>	<b>30,041,749,027.00</b>	<b>100.38</b>

## B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7,969,922,769.00 dan Rp8,875,760,549.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar -10.21% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pagu Belanja Pegawai BPTP Jawa Barat TA. 2018 lebih kecil dari Pagu Belanja Pegawai TA. 2017
2. Adanya beberapa pegawai yang sudah purna bakti/pensiun dalam di Tahun Anggaran 2018

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7,858,848,522.00	8,828,038,797.00	-10.98
Belanja Lembur	118,747,000.00	76,587,650.00	55.05
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>7,977,595,522.00</b>	<b>8,904,626,447.00</b>	<b>-10.41</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>-7,672,753.00</b>	<b>-28,865,898.00</b>	<b>-73.42</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7,969,922,769.00</b>	<b>8,875,760,549.00</b>	<b>-10.21</b>

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp49,766,731,221.00 dan Rp17,106,196,314.00. Realisasi belanja barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 190.93% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Revisi DIPA Penambahan Pagu Anggaran TA. 2018
2. Pada Pos Anggaran Belanja Barang ada Tambahan Kegiatan Program BEKERJA

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,320,714,550.00	1,458,903,724.00	-9.47
Belanja Barang Non Operasional	5,926,452,840.00	3,280,118,750.00	80.68
Belanja Barang Persediaan	3,998,975,355.00	7,880,459,550.00	-49.25
Belanja Jasa	997,275,332.00	1,094,556,989.00	-8.89
Belanja Pemeliharaan	392,238,100.00	413,696,450.00	-5.19
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4,529,562,655.00	2,570,507,851.00	76.21
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	32,601,512,389.00	407,953,000.00	7,891.49
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>49,766,731,221.00</b>	<b>17,106,196,314.00</b>	<b>190.93</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>49,766,731,221.00</b>	<b>17,106,196,314.00</b>	<b>190.93</b>

**B.5. BELANJA MODAL**

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2,461,315,785.00 dan Rp4,059,792,164.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar -39.37% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada TA. 2018 Belanja Modal tidak sebesar TA. 2017

Perbandingan Belanja Modal  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,346,754,785.00	1,591,360,064.00	47.47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98,976,000.00	2,176,742,100.00	-95.45
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	291,690,000.00	-100.00
Belanja Modal Lainnya	15,585,000.00	0.00	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2,461,315,785.00</b>	<b>4,059,792,164.00</b>	<b>-39.37</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2,461,315,785.00</b>	<b>4,059,792,164.00</b>	<b>-39.37</b>



### B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2,346,754,785.00 dan Rp1,591,360,064.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 47.47% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh Terserapnya seluruh belanja modal yang berasal dari anggaran perubahan yaitu APBN-P adapun Belanja Modal Peralatan dan Mesin antara lain : Pembelian 1 (satu) paket Alat Laboratorium, 2 (dua) unit Kendaraan Operasional, 1 unit Kendaraan Dinas, dan 1 Unit Kendaraan Truck, 1 Paket Meubelair, 1 Paket PC dan Laptop

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,346,754,785.00	1,591,360,064.00	47.47
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2,346,754,785.00</b>	<b>1,591,360,064.00</b>	<b>47.47</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2,346,754,785.00</b>	<b>1,591,360,064.00</b>	<b>47.47</b>

### B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp98,976,000.00 dan Rp2,176,742,100.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami penurunan sebesar -95.45% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain pada TA. 2018 anggaran untuk belanja modal Gedung dan Bangunan hanya renovasi saja adapun Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah :Renovasi Guest House

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98,976,000.00	2,176,742,100.00	-95.45
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>98,976,000.00</b>	<b>2,176,742,100.00</b>	<b>-95.45</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>98,976,000.00</b>	<b>2,176,742,100.00</b>	<b>-95.45</b>

#### B.5.4. BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15,585,000.00 dan Rp0.00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0.00% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan adanya berupa Pembelian Buku Perpustakaan untuk mendukung referensi sebagai bahan kajian pada BPTP Jawa Barat

Perbandingan Belanja Modal Lainnya  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	15,585,000.00	0.00	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>15,585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>15,585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp60,000,000.00 dan Rp118,300,000.00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang Bukan Pajak	60,000,000.00	118,300,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>118,300,000.00</b>

#### C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp16,387,684.00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti  
Rugi  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Nama	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Nama Debitur 1	0.00	0.00
2.	Nama Debitur 2	0.00	0.00
3.	dst...(tolong diisi)	0.00	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>0.00</b>	<b>16,387,684.00</b>

#### C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-6,000,000.00 dan Rp-591,500.00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0.00	0.5%	0.00
Kurang Lancar	0.00	10%	0.00
Diragukan	0.00	50%	0.00
Macet	0.00	100%	0.00

**C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp-9,203,784.00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0.00	0.5%	0.00
Kurang Lancar	0.00	10%	0.00
Diragukan	0.00	50%	0.00
Macet	0.00	100%	0.00

**C.1.5. Persediaan**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1,615,397,000.00 dan Rp532,303,000.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Suku Cadang	3,314,000.00	2,927,500.00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	169,853,000.00	169,853,000.00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	238,100,000.00	238,100,000.00
Bahan Baku	1,204,130,000.00	121,422,500.00
<b>Jumlah</b>	<b>1,615,397,000.00</b>	<b>532,303,000.00</b>

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp47,379,008,000.00 dan Rp5,715,200,000.00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>5,715,200,000.00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	41,663,808,000.00
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>47,379,008,000.00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

1. Hasil Penilaian Revaluasi
2. Dari Hasil Revaluasi terdapat penambahan Nilai Tanah di KP Cipaku

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp17,152,195,221.00 dan Rp14,545,861,236.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>14,545,861,236.00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	1,885,912,000.00
Transfer Masuk	306,310,000.00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	460,842,785.00
Reklasifikasi Masuk	38,469,200.00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-85,200,000.00
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>17,152,195,221.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-12,376,966,323.00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>4,775,228,898.00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Adanya Pembelian Peralatan dan Mesin guna mendukung Tupoksi BPTP
2. Adanya Transfer Masuk dari BBP2TP Berupa Kendaraan Dinas

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp18,412,816,709.00 dan Rp10,169,798,514.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>10,169,798,514.00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Transfer Masuk	505,999,995.00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	98,976,000.00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	251,475,739.00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	9,527,912,083.00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-1,932,078,849.00
Koreksi Pencatatan	-194,566,773.00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-14,700,000.00
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>18,412,816,709.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-415,522,427.00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>17,997,294,282.00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dari Hasil Revaluasi
2. Adanya penambahan nilai gedung dan bangunan dari hasil renovasi Guest House

#### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2,436,146,060.00 dan Rp2,577,718,226.00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>2,577,718,226.00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	117,148,222.00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-145,442,222.00
Reklasifikasi Keluar	-38,469,200.00
Koreksi Pencatatan	-56,908,966.00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-17,900,000.00
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>2,436,146,060.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-565,113,352.00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>1,871,032,708.00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Koreksi Hasil Penilaian Kembali
2. Akumulasi Penyusutan

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp403,126,882.00 dan Rp387,541,882.00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>387,541,882.00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	15,585,000.00
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>403,126,882.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0.00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>403,126,882.00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah berupa:

1. Tidak ada Mutasi Masuk
2. Terjadi penambahan karena adanya pembelian Buku Perpustakaan

#### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-13,357,602,102.00 dan Rp-13,661,786,658.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	17,152,195,221.00	-12,376,966,323.00	4,775,228,898.00
2.	Gedung dan Bangunan	18,412,816,709.00	-415,522,427.00	17,997,294,282.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,436,146,060.00	-565,113,352.00	1,871,032,708.00
4.	Aset Tetap Lainnya	403,126,882.00	0.00	403,126,882.00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>38,404,284,872.00</b>	<b>-13,357,602,102.00</b>	<b>25,046,682,770.00</b>

#### C.4. ASET LAINNYA

##### C.4.1. ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6,115,000.00 dan Rp6,115,000.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:



Uraian	Nilai
Software	6,115,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>6,115,000.00</b>

#### C.4.2. ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp445,565,400.00 dan Rp327,765,400.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat serta dalam proses penghapusan dari BMN.

#### C.4.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-429,422,326.00 dan Rp-330,822,900.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

##### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6,115,000.00	-4,586,250.00	1,528,750.00
2.	Aset Lain-lain	445,565,400.00	-424,836,076.00	20,729,324.00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>451,680,400.00</b>	<b>-429,422,326.00</b>	<b>22,258,074.00</b>

#### C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

##### C.5.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp14,287,216.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

##### Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga

per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0.00	14,287,216.00
<b>Jumlah</b>	<b>0.00</b>	<b>14,287,216.00</b>

#### C.6. EKUITAS

#### C.6. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp74,117,345,844.00 dan Rp20,380,298,884.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp364,717,700.00 dan Rp1,123,614,346.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0.00	130,717,396.00	-100.00
Pendapatan Jasa Lainnya	3,250,000.00	0.00	0.00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	0.00	12,675,000.00	-100.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	7,500,000.00	0.00	0.00
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	42,500,000.00	0.00	0.00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0.00	969,178,000.00	-100.00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	289,629,100.00	0.00	0.00
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	6,000,000.00	0.00	0.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15,838,600.00	11,043,950.00	43.41
<b>Jumlah</b>	<b>364,717,700.00</b>	<b>1,123,614,346.00</b>	<b>-67.54</b>

Jasa Giro, Pendapatan Hasil Benih UPBS, Denda Keterlambatan Pekerjaan, dan pendapatan dari sewa Guest

### D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7,969,922,769.00 dan Rp7,969,922,769.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	5,316,650,020.00	5,991,794,500.00	-11.27
Beban Pembulatan Gaji PNS	73,187.00	68,199.00	7.31
Beban Tunj. Anak PNS	119,107,938.00	115,427,472.00	3.19
Beban Tunj. Beras PNS	279,686,040.00	300,180,900.00	-6.83
Beban Tunj. Fungsional PNS	882,048,000.00	1,083,295,000.00	-18.58
Beban Tunj. PPh PNS	37,586,484.00	77,717,778.00	-51.64
Beban Tunj. Struktural PNS	18,540,000.00	8,100,000.00	128.89
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	386,439,100.00	400,599,050.00	-3.53
Beban Tunjangan Umum PNS	148,585,000.00	148,450,000.00	0.09
Beban Uang Lembur	118,747,000.00	76,587,650.00	55.05
Beban Uang Makan PNS	662,460,000.00	673,540,000.00	-1.65
<b>Jumlah</b>	<b>7,969,922,769.00</b>	<b>8,875,760,549.00</b>	<b>-10.21</b>

Diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

### D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8,117,466,355.00 dan Rp8,683,725,015.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	6,752,495,350.00	7,532,215,100.00	-10.35
Beban Persediaan konsumsi	1,216,505,355.00	921,460,465.00	32.02
Beban persediaan lainnya	148,465,650.00	230,049,450.00	-35.46
<b>Jumlah</b>	<b>8,117,466,355.00</b>	<b>8,683,725,015.00</b>	<b>-6.52</b>

Beban Persediaan Bahan Baku yang bersumber dari kegiatan BEKERJA dan UPBS, dan Ternak

#### D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8,230,155,506.00 dan Rp5,847,866,679.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Bahan	3,145,398,840.00	950,132,250.00	231.05
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,628,569,000.00	1,842,546,500.00	-11.61
Beban Barang Operasional Lainnya	74,933,750.00	70,700,000.00	5.99
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	170,920,000.00	171,000,000.00	-0.05
Beban Honor Output Kegiatan	1,152,485,000.00	487,440,000.00	136.44
Beban Jasa Konsultan	0.00	25,000,000.00	-100.00
Beban Jasa Lainnya	25,000,000.00	0.00	0.00
Beban Jasa Profesi	195,300,000.00	184,000,000.00	6.14
Beban Keperluan Perkantoran	1,052,291,500.00	1,192,606,624.00	-11.77
Beban Langganan Listrik	131,542,462.00	210,741,242.00	-37.58
Beban Langganan Telepon	17,385,654.00	23,202,963.00	-25.07
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	22,569,300.00	24,597,100.00	-8.24
Beban Sewa	613,760,000.00	665,900,000.00	-7.83
<b>Jumlah</b>	<b>8,230,155,506.00</b>	<b>5,847,866,679.00</b>	<b>40.74</b>

Beban atas barang jasa pada BPTP Jawa Barat TA. 2018 merupakan kompilasi dari keperluan atas belanja yang bersifat guna menunjang keperluan perkantoran dalam hal ini kebutuhan rumah tangga Balai

#### D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp685,948,000.00 dan Rp737,340,150.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	108,322,000.00	110,825,000.00	-2.26
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	283,916,100.00	302,871,450.00	-6.26
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	81,192,025.00	79,515,700.00	2.11
Beban Persediaan suku cadang	212,517,875.00	244,128,000.00	-12.95
<b>Jumlah</b>	<b>685,948,000.00</b>	<b>737,340,150.00</b>	<b>-6.97</b>

Peleburan Gedung Kantor, Perawatan Kendaraan Dinas, Perawatan Suku Cadang

**D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4,529,562,655.00 dan Rp2,570,507,851.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	3,595,811,034.00	2,329,935,351.00	54.33
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	585,110,000.00	850,000.00	68,736.47
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	348,641,621.00	239,722,500.00	45.44
<b>Jumlah</b>	<b>4,529,562,655.00</b>	<b>2,570,507,851.00</b>	<b>76.21</b>

Perjalanan Dinas untuk mendukung tugas dan Tupoksi Kegiatan Pengkajian di BPTP Jawa Barat

**D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT**

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp33,658,657,389.00 dan Rp13,762,325,723.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	29,249,108,065.00	783,370,000.00	3,633.75
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0.00	31,328,250.00	-100.00
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	4,409,549,324.00	938,809,500.00	369.70
Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0.00	12,008,817,973.00	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>33,658,657,389.00</b>	<b>13,762,325,723.00</b>	<b>144.57</b>

Pada TA 2018 BPTP Jawa Barat mendapat mandat untuk melaksanakan Kegiatan Baru berupa Program BEKERJA yang didalam pelaksanaannya merupakan Program Bantuan kepada Masyarakat dalam bentuk bantuan Barang yang selanjutnya telah disalurkan kepada Masyarakat yang berhak

**D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1,767,750,914.00 dan Rp1,398,689,347.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Amortisasi Software	1,528,750.00	1,528,750.00	0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	397,991,330.00	156,761,949.00	153.88
Beban Penyusutan Irigasi	20,442,624.00	10,673,224.00	91.53
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	9,440,600.00	5,690,896.00	65.89
Beban Penyusutan Jaringan	44,469,648.00	44,469,648.00	0.00

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,413,475.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,292,464,487.00	1,179,564,880.00	9.57
<b>Jumlah</b>	<b>1,767,750,914.00</b>	<b>1,398,689,347.00</b>	<b>26.39</b>

Penyusutan Gedung dan Bangunan, Irigasi, Jaringan dan peralatan dan mesin sudah tertuang dalam aplikasi SIMAK BMN

#### D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-3,795,284.00 dan Rp9,795,284.00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyisihan Piutang PNBP	5,408,500.00	591,500.00	814.37
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-9,203,784.00	9,203,784.00	-200.00
<b>Jumlah</b>	<b>-3,795,284.00</b>	<b>9,795,284.00</b>	<b>-138.75</b>

#### D.10. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-19,417,850.00	-2,457,601,407.00	-99.21
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	0.00	16,387,684.00	-100.00



*Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2018*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>	<b>% Naik / Turun</b>
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	16.00	0.00	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1,069,831,750.00	569,245,240.00	87.94
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	5,267,780,000.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10,085,036.00	5,741,228.00	75.66
<b>Jumlah</b>	<b>6,328,278,952.00</b>	<b>-1,866,227,255.00</b>	<b>-439.09</b>

Pengembalian/Denda atas keterlambatan pekerjaan dan Pengembalian Belanja Pegawai telah dilakukan sesuai dengan aturan perbendaharaan

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp20,380,298,884.00 dan Rp33,970,356,438.00.

### E.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-58,262,671,652.00 dan Rp-42,628,623,507.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

### E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp51,301,456,241.00 dan Rp-1,528,750.00.

#### E.4.1. KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

#### E.4.2. KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-7,412,064.00 dan Rp-1,528,750.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-5,610,469.00
Akumulasi Penyusutan Irigasi	3,205,765.00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	14,227,240.00

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-19,234,600.00
Gedung dan Bangunan	56,908,966.00
Irigasi	-38,469,200.00
Jalan dan Jembatan	-56,908,966.00
Peralatan dan Mesin	38,469,200.00
<b>Jumlah</b>	<b>-7,412,064.00</b>

#### E.4.3. PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

#### E.4.4. SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp51,308,868,305.00 dan Rp0.00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	41,663,808,000.00
Gedung dan Bangunan	7,595,833,234.00
Jalan dan Jembatan	-82,297,000.00
Irigasi	54,003,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>51,308,868,305.00</b>

#### E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp60,698,262,371.00 dan Rp29,040,094,703.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	60,197,969,775.00
Diterima dari Entitas Lain	-449,490,436.00
Transfer Masuk	949,783,032.00
<b>Jumlah</b>	<b>60,698,262,371.00</b>

**E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2018 saldo DDEL adalah sebesar Rp-449,490,436.00 sedangkan DKEL sebesar Rp60,197,969,775.00.

**E.5.2. TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp949,783,032.00 yang terdiri dari:

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp949,783,032.00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2018.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi		107,444,000.00
2.	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		63,574,000.00
3.	Bahan Baku		25,840,000.00
4.	Persediaan Lainnya		37,388,000.00
5.	Peralatan dan Mesin		306,310,000.00
6.	Gedung dan Bangunan		505,999,995.00

*Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2018*

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
7.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		-96,772,963.00
<b>Jumlah</b>			<b>949,783,032.00</b>

**E.6. EKUITAS AKHIR**

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp74,117,345,844.00 dan Rp20,380,298,884.00.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada BPTP Jawa Barat TA 2018, tidak ada penggantian Pejabat Pengelola Keuangan pada Penanda tangan SPM
- Tindak lanjut hasil temuan audit Inspektorat Nomor R.48/PW.140/G.4/01/2018 perihal Pencatatan MAK 526 pada Persediaan sudah dilakukan dan tertuang dalam Berita Acara Stock Opname Persediaan dan sudah di jelaskan

### F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Pada Tahun Anggaran 2018 BPTP JAWA BARAT mendapat tambahan tugas untuk melaksanakan kegiatan Program Berantas Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA). Sasaran dari program ini adalah Rumah Tangga Miskin yang bergerak di bidang Pertanian, adapun total anggaran yang di dapat/Tambahan DIPA Ta. 2018 adalah sebesar Rp.65.010.000.000 dengan target RTM 11.381 dan DOC yang di salurkan sebanyak 569.050 ekor. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Garut untuk 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Leles, dan Kecamatan Malangbong. Rentang waktu pelaksanaan di mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018
- Pencatatan dan penatausahaan aset satker BPTP JABAR per 31 Desember 2018 senilai RP 2,629.610.232 saat ini dimanfaatkan oleh PT. RPN (PPTK GAMBUNG). Secara rinci jenis aset tersebut adalah sebagai berikut:

Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Aset	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
1.	Tanah	0	
2.	Gedung Bangunan	2.193.147.000	
3.	Peralatan Mesin	231.858.616	
4.	Jaringan	15.789.174	
5.	Aset Tetap Lainnya	41.651.042	
6.	Aset Tetap yang tidak Digunakan	147.164.400	
		2.629.610.232	

- Atas permasalahan pemanfaatan aset BPTP JABAR oleh PT RPN tersebut satker telah berkoordinasi dengan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian guna mendapatkan penyelesaian permasalahan pemindahan aset yang masih di pakai PT. RPN

- Permasalahan tersebut telah ditangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa status kelembagaan PT. RPN akan diubah menjadi anak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (yang merupakan holding BUMN Perkebunan), dan BMN Kementerian Pertanian yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan oleh PT. RPN akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP),
- Badan Litbang Pertanian telah memerintahkan kepada Satker yang mencatat BMN yang dipergunakan PT. RPN termasuk BPTP Jawa Barat untuk melakukan koordinasi dengan PT. RPN guna melakukan Inventarisasi BMN yang sedang diusulkan sebagai PMPP, hasil inventarisasi antara lain :
  - Terdapat BMN yang telah rusak berat dan sudah tidak dipergunakan lagi,
  - Memproses Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap BMN (selain tanah) yang belum di PSP,
  - Penertiban Pencatatan BMN